

**ANALISIS KOMPETENSI
SDM DALAM PENGGUNAAN ALAT
DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPOLISIAN (AK) 23
DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : AGUNG RUSDIANA
NPM : 2144021002
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Agung Rusdiana
NPM : 2144021002
Jurusan : Adminsitrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Kompetensi SDM Dalam Penggunaan Alat Digitalisasi Administrasi Kepolisian (AK) 23 di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Analysis Of Human Resources Competency In The Use Of Digitalized Police Administration Tools (Ak) 23 In The Indonesian National Police.

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Asropi, M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A.)

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

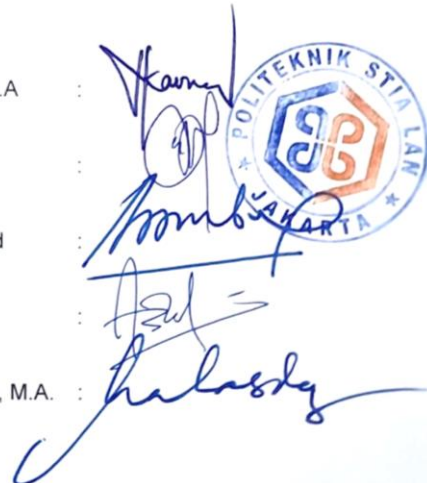
NAMA : AGUNG RUSDIANA
NPM : 2144021002
JURUSAN : ADMINSTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
JUDUL TESIS : ANALISIS KOMPETENSI SDM DALAM PENGGUNAAN
ALAT DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPOLISIAN (AK)
23 DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Oktober 2023
Pukul : 15.00 – 16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Prof. Dr. R. Luki Karunia, M.A :
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si :
Anggota : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd :
Pembimbing I : Dr. Asropi, M.Si :
Pembimbing II : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. :



The image shows handwritten signatures in blue ink next to the names of the examiners. To the right of the signatures is a circular official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta. The stamp features a central logo with the letters 'S' and 'P' intertwined, surrounded by the text 'POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA' and decorative stars.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Agung Rusdiana
NPM : 2144021002
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul "**Analisis Kompetensi SDM Dalam Penggunaan Alat Digitalisasi Administrasi Kepolisian (AK) 23 di Kepolisian Negara Republik Indonesia**" adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Agung Rusdiana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya adalah sehingga Tesis yang berjudul “***Analisis Kompetensi SDM Dalam Penggunaan Alat Digitalisasi Administrasi Kepolisian (AK23) di Kepolisian Negara Republik Indonesia***” selesai tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penelitian Tesis ini untuk mempelajari cara pembuatan Tesis pada Politeknik STIA LAN Jakarta dan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada untuk menyelesaikan tesis ini agar tidak menyimpang dari ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan untuk memenuhi tuntutan ilmiah, meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun dari segi penyajian karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Untuk itu peneliti dengan senang hati dan terbuka menerima kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Ucapan tulus terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya peneliti ditujukan kepada Dr. Asropi, M.Si dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah berjasa membantu memberikan arahan, masukan dan waktu serta tenaganya selama proses penyusunan tesis ini. Selain itu peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh jajaran Dosen dan staf Program Magister Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan dan atas bantuannya selama ini.
2. Tim Penguji Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, M.A, Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si dan Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd pada sidang tesis yang telah memberikan saran-saran dan masukan yang berharga untuk penyempurnaan tesis ini.
3. Seluruh civitas akademika di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, dan telah melayani kebutuhan dalam proses perkuliahan serta memberikan bantuan kepastakaan peneliti.

4. Ibu dan Bapak yang selama ini sudah mengasuh dan merawat dengan penuh cinta serta pengorbanannya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, berkah dan pahala yang melimpah.
5. Istriku Utami Dewi dan anak-anakku (Raisha dan Nisa) berikut keluarga besar Alm kakek Amad yang telah memberikan semangat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan penyusunan tesis ini.
6. Kapusinafis Bareskrim Polri, Sespusinafis Bareskrim Polri, para Pejabat Utama, para Kasi Ident dan seluruh rekan-rekan baik di Pusinafis Bareskrim maupun jajaran identifikasi kewilayahan terimakasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian.
7. Teman-teman satu kelas MSDA 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang sangat besar selama masa studi, kenangannya Insyaallah tidak bisa dilupakan, semoga silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan moril, sehingga Tesis ini dapat selesai.

Hanya doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta perhatian yang tidak henti kepada peneliti.

Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Semoga Tesis ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2023

Agung Rusdiana

ABSTRAK

Analisis Kompetensi SDM dalam Penggunaan Alat Digitalisasi Administrasi Kepolisian (AK) 23 di Kepolisian Negara Republik Indonesia

Agung Rusdiana, Asropi, Mala Sondang Silitonga
Agung.rusdiana82@yahoo.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi SDM dalam penggunaan alat Digitalisasi Administrasi Kepolisian (AK) 23 serta menyusun strategi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM. Peneliti menganalisis 8 faktor yang mempengaruhi kompetensi, yaitu keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual dan budaya organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan ruang lingkup di Pusinafis Bareskrim Polri dan Identifikasi Kewilayahan. Teknik analisa penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian faktor Kemampuan Intelektual dan Isu Emosional tidak berkaitan dengan kompetensi sedangkan faktor Keyakinan dan nilai-nilai, Karakteristik Kepribadian, Keterampilan, Pengalaman, Motivasi dan Budaya Organisasi, berkaitan dengan kompetensi. Budaya Organisasi diperlukan perbaikan dalam rangka membenahi tatakelola Identifikasi Kewilayahan. Selain itu ditemukan temuan lain selain budaya organisasi, fakta beban kerja Identifikasi Kewilayahan bukan saja diperuntukkan bagi fungsi Reskrim tetapi juga fungsi-fungsi lain yang memerlukan layanan Identifikasi, seperti Intelkam, Narkoba, Lantas serta melaksanakan fungsi laboratorium forensik di wilayah dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, berikutnya hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa struktur organisasi Identifikasi Kewilayahan dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi kebutuhan saat ini khususnya dibidang forensik.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menawarkan strategi yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang pada akhirnya dapat meningkatkan capaian input data sidik jari: perubahan struktur organisasi Identifikasi Kewilayahan, pengembangan karir anggota Identifikasi dengan diberikan kesempatan untuk alih golongan dari Bintara ke Perwira dan pengembangan karir anggota Identifikasi melalui kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan peralatan identifikasi secara merata dan berkelanjutan untuk anggota identifikasi tingkat Polda dan Polres, baik secara internal dan kerja sama dengan Kepolisian luar negeri.

Kata kunci: Kompetensi, Sumber Daya Manusia, Alat Digitalisasi AK23

ABSTRACT

Analysis Of Human Resources Competency In The Use Of Digitalized Police Administration Tools (AK) 23 In The Indonesian National Police

Agung Rusdiana, Asropi, Mala Sondang Silitonga
Agung.rusdiana82@yahoo.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

The aim of this research is to determine the factors that influence human resources competency in using the Police Administration Digitalization (AK) 23 tool and to develop strategies to improve human resources competency. Researchers analyzed 8 factors that influence competence, namely beliefs and values, skills, experience, personality characteristics, motivation, emotional issues, intellectual abilities and organizational culture. This research uses qualitative methods with scope in the National Police Criminal Investigation Unit and Regional Identification. The research analysis technique used is descriptive analysis. The research results of the Intellectual Ability and Emotional Issues factors are not related to competence, while the Beliefs and Values factors, Personality Characteristics, Skills, Experience, Motivation and Organizational Culture, are related to competence. Organizational culture needs improvement in order to improve the governance of Regional Identification. Apart from that, other findings were found apart from organizational culture, the fact that the Regional Identification workload was not only intended for the Criminal Investigation function but also other functions that required Identification services, such as Intelligence, Security, Narcotics, Traffic as well as carrying out forensic laboratory functions in areas with a sufficient number of human resources. limited, then the results of the documentation study show that the organizational structure of Regional Identification is considered to be no longer relevant to the current conditions and situation needs, especially in the field of forensics.

Based on these problems, the researcher offers a strategy that can be used to improve human resources competency which can ultimately increase the achievement of fingerprint data input: changes to the organizational structure of Regional Identification, career development of Identification members by being given the opportunity to change classes from Bintara to Perwira and career development of Identification members through training activities to increase the ability of identification equipment evenly and continuously for identification members at the Polda and Polres, both internally and in collaboration with foreign police

Keywords: Competence, Human Resources, AK23 Digitalization Tool

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	18
C. Rumusan Permasalahan	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Metode Penelitian	50
B. Teknik Pengumpulan Data.....	50
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
D. Instrumen Penelitian	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	56
A. Deskripsi Objek Penelitian	56
1. Profil Pusinafis Bareskrim Polri.....	56
2. Visi dan Misi Pusinafis Bareskrim Polri	57
3. Struktur Organisasi	58
B. Hasil dan Analisis Penelitian	64
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia	64

2. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3).....	91
3. Strategi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Kegiatan Terkait Sidik Jari Antara Indonesia dan Jepang.....	7
Tabel 1.2 Target Kinerja Pusinafis Bareskrim Polri 2020 s.d. 2022.....	11
Tabel 1.3 Data Pengambilan Sidik Jari Kewilayahan Tahun 2022	12
Tabel 1.4 Daftar Anggota Pusinafis dan Identifikasi Kewilayahan	15
Tabel 1.5 Kondisi Anggota Pusinafis dan Identifikasi Kewilayahan	16
Tabel 2.1 Indikator Kompetensi	41
Tabel 2.2 Model Kompetensi Goleman, Boyatzis dan Mckee.....	44
Tabel 3.1 Informan Kunci Penelitian	51
Tabel 4.1 Data Personel Pusinafis Bareskrim Polri berdasarkan Kepangkatan/ Golongan.....	59
Tabel 4.2 Data Personel Identifikasi Kewilayahan berdasarkan Kepangkatan/ Golongan.....	61
Tabel 4.3 Data Keterampilan Satuan Wilayah.....	70
Tabel 4.4 Kegiatan Identifikasi Tingkat Polda	86
Tabel 4.5 Kegiatan Identifikasi Tingkat Polres	87
Tabel 4.6 Data Kegiatan Sertifikasi Kompetensi	93

STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alat Digitalisasi AK23	5
Gambar 2.1 The Iceberg Model	41
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data (Miles dan Huberman, 1984)	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bareskrim Polri.....	56
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pusinafis Bareskrim Polri	58
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda.....	62
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Polres	63
Gambar 4.5 Kegiatan petugas Identifikasi pencarian sidik jari laten Pada Barang Bukti	68
Gambar 4.6 Kegiatan Petugas Identifikasi Memberikan Materi Kepada Dokter Forensik.....	69
Gambar 4.7 Kegiatan Pelatihan Alat Digitalisasi AK23	70
Gambar 4.8 Kegiatan Identifikasi Korban Tsunami Banten	72
Gambar 4.9 Petugas Identifikasi Jadi Saksi di Pengadilan.....	73
Gambar 4.10 Kondisi Ruangan Identifikasi dari Peti Kemas	82
Gambar 4.11 Struktur Organisasi Bidang Identifikasi Polda.....	95
Gambar 4.12 Struktur Organisasi Satuan Identifikasi Polres.....	96

STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	49
----------------------------------	----



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian
3. Surat Telah Telaksanakan Penelitian
4. Foto Kegiatan Wawancara Lapangan
5. Informan Kunci Penelitian
6. Transkrip Wawancara Informan

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Pendahuluan

Dalam rangka penegakan hukum penanggulangan setiap kejahatan merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana. Komponen fungsi dari sistem tersebut adalah kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, Sistem peradilan pidana dapat dijelaskan ialah peradilan suatu pidana yang berproses, pihak yang mengadili disebut pengadilan dan kembali memasyarakatkan orang-orang terhakum disebut lembaga pemasyarakatan, yang bersinergi dan bekerja sama, usaha mewujudkan penanggulangan kejahatan secara terpadu.

Undang-Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (h), bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian. Sehingga sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, seorang anggota Kepolisian harus mempunyai pengetahuan atau keterampilan, dalam hal ini menjadi sangat penting anggota tersebut dalam melakukan proses identifikasi seseorang, baik sebagai korban, saksi maupun korban dalam rangka menemukan identitas orang tersebut. Dengan maksud mengenalkan kembali terhadap identitas seseorang, sebuah benda atau seekor hewan dengan cara mengetahui tanda-tanda yang dimiliki pada orang tersebut, hewan maupun benda dimaksud merupakan arti dari Identifikasil. Menurut harfiah Identifikasi berawal dari kalimat *to Identify* artinya kembali mengenal, sedangkan *Identity* artinya ciri-ciri atau tanda-tanda.

Saat mengidentifikasi seseorang cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan biometrik, salah satu nya adalah melalui sidik jari, sidik jari

dipelajari melalui ilmu yang dinamakan ilmu daktiloskopi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Dactilos* dan *Scopein*, *Dactilos* dapat diartikan jari-jemari atau garis-garis jari sedangkan *Scopein* berarti meneliti atau mengamati. Sidik jari adalah suatu hasil pembentukan dari tapak jari, dalam pembentukannya secara sengaja diambil atau dicapkan dengan menggunakan tinta khusus untuk sidik jari ataupun bekas yang tertinggal pada suatu benda karena sudah pernah tersentuh oleh bagian kulit telapak tangan atau kaki. Ilmu sidik jari (Daktiloskopi) menjelaskan karakteristik sidik jari manusia tidak ada yang sama bahkan kembar sekalipun, selain itu selama seumur hidup tidak berubah. Karena sifatnya tidak akan berubah, saat ini sidik jari merupakan sarana yang tepat dan meyakinkan dalam menentukan identitas seseorang. Menurut (Sutra, 2012) :

“Alat bukti sidik jari merupakan alat bukti berupa keterangan seorang ahli (verklaringen van een deskundige: expert testimony). Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan”

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sudah mengedepankan metode *Scientific Criminal Investigation* (pembuktian secara ilmiah), salah satunya menggunakan sidik jari. Kegiatan lainnya yaitu penyelenggaraan daktiloskopi, yaitu kegiatan mengambil, merekam, mempelajari, mengamati, mengembangkan, merumuskan, membuat keterangan sidik jari seseorang, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen. Sidik jari termasuk dalam metode pengungkapan bersifat primer. Dalam bantuan teknis kegiatan penyidikan tindak pidana, pengungkapan dengan sidik jari tidak membutuhkan waktu lama, karena proses yang dilakukan yaitu dengan cara memeriksa dan membandingkan antara sidik jari korban/saksi/tersangka dengan data *ante mortem* yaitu sidik jari pembanding, jika hasil pemeriksaan ditemukan kesamaan minimal 12 (dua belas titik) titik karakteristik yang sama, maka dapat dipastikan identitas orang tersebut benar. Pengambilan dan pendokumentasian sidik jari, hanya dapat dikerjakan seorang ahli yang sudah mengetahui tentang ilmu sidik jari, tidak sembarang orang dapat melakukan kegiatan ini, hanya tenaga ahli yang dapat melakukannya, pihak Kepolisian yang menangani terkait kegiatan identifikasi dalam hal ini yaitu unit Kepolisian pada bagian identifikasi sidik jari.

Bantuan teknis pengungkapan tindak pidana melalui sidik jari, Polda D.I. Yogyakarta berhasil mengungkap pelaku dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2023. Berawal dari penemuan mayat tanpa identitas dengan jenis kelamin perempuan di wilayah hukum Polsek Pakem, melalui identifikasi sidik jari identitas mayat tersebut ditemukan. Selanjutnya anggota unit identifikasi melakukan kegiatan pengolahan TKP. Kegiatan olah TKP yang dilakukan menemukan barang bukti yaitu *casing hand phone* warna pink, setelah dilakukan pencarian sidik jari laten pada barang bukti ditemukan sidik jari laten. Sidik jari laten tersebut kemudian dilakukan pencarian dengan menggunakan alat *Inafis Portable System*, hasil pencarian identik dengan jari telunjuk tangan kanan seseorang yang diduga pelaku pembunuhan, sehingga terbukti bahwa sidik laten yang ditemukan pada barang bukti benar milik pelaku. Menurut Scheikert dalam (Karjadi, 1971) saat menjadi kepala kantor Pusat Daktiloskopi di Berlin:

“Pernah membuktikan bahwa tiap-tiap jari yang didapat dari tempat kejahatan, setelah diperiksa asal dari jari-jari tangan mana, kemudian dicocokkan dengan kumpulan tiap-tiap jari dari penjahat-penjahat yang pernah ditangkap mendapatkan hasil yang memuaskan dan bahkan sebagian besar tertangkap karena tiap-tiap jari itu”

Bantuan teknis lainnya yaitu penggunaan sidik jari dalam mengungkap identitas seseorang korban kecelakaan massal, sebagai contoh identifikasi jenazah korban kecelakaan pesawat Air Asia yang jatuh dilaut perairan Kalimantan tahun 2014, korban pesawat Trigana Air jatuh di kabupaten pegunungan Jaya Wijaya, Papua tahun 2015, jenazah kecekaan pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu tahun 2018, Papua dan masih banyak lagi. Satuan kerja pada Polri yang mempunyai tugas dan pokok terkait dengan identifikasi adalah Pusinafis Bareskrim Polri. Dalam mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Pusinafis mengedepankan pembuktian secara ilmiah, yaitu salah satunya melalui sidik jari. Berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang daftar Organisasi dan Susunan Tata Kerja Organisasi tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pusinafis Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana kegiatan teknis bidang identifikasi yang berada dibawah Bareskrim Polri. Sedangkan Identifikasi Kewilayahan disebut dengan Sie Identifikasi Polda berdasarkan

Perkap Nomor 14 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang daftar Organisasi dan Susunan Tata Kerja tingkat Kepolisian Daerah, Sie Identifikasi berada dibawah Reserse Kriminal Umum (Reskrim), dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor untuk Identifikasi tingkat Polres berada dibawah Satuan Reserse Kriminal.

Pusinafis sudah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kegiatan daktiloskopi sejak tahun 1980, dilakukan secara manual, yaitu pengambilan / perekaman sidik jari seseorang (kriminal: tersangka dan non kriminal: SKCK) dengan menggunakan Kartu Sidik Jari AK23, istilah AK23, AK yaitu Administrasi Kepolisian, angka 23 diambil dari urutan nomor administrasi dokumen di Polri. 10 sidik jari tangan (kanan dan kiri) yang akan diambil dilaburi tinta sidik jari khusus, setelah itu kemudian di tempel pada Kartu Sidik Jari AK23 kemudian dilakukan perumusan sidik jari, selanjutnya didokumentasikan secara manual dalam *filling cabinet*, dalam rangka membangun *database* sidik jari pada Polri. Suatu saat data sidik jari tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan pencarian pada rak *filling cabinet* secara manual. Metode pengambilan sidik jari secara manual ini terdapat kekurangan, sebagai berikut:

- a. Penggunaan tinta sidik jari harus disesuaikan ketebalannya, jika pengambilan sidik jari terlalu banyak tinta, maka kualitas gambar sidik jari yang diambil kurang bagus begitupun sebaliknya apabila terlalu tipis tinta yang ditempelkan pada sidik jari hasilnya akan sama, akibatnya akan banyak kartu sidik jari AK23 yang terbuang sia-sia. Hal ini akan menyulitkan jika sidik jari tersebut digunakan sebagai data pembandingan dalam pemeriksaan, sehingga kualitas gambar pengambilan sidik jari dituntut wajib bagus;
- b. Kartu sidik jari tersebut ada kemungkinan tidak tersimpan dengan baik (tercecer);
- c. Target data sidik jari yang tersimpan tidak terlalu banyak;
- d. Terjadi kesalahan dalam proses dokumentasi kartu sidik jari AK23, yang mengakibatkan kesulitan saat pencarian data kembali;

- e. Penyimpanan data kartu sidik jari AK23 masih manual dalam *filling cabinet*, apabila data sidik jari tersebut dibutuhkan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana membutuhkan waktu lama untuk mencarinya;
- f. Kartu sidik jari AK23 dari Kewilayahan tidak tersimpan secara terpusat.

Berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Susunan Tata Kerja Satuan Organisasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok fungsi Pusinafis Bareskrim Polri adalah menyelenggarakan pembinaan teknis sistem informasi sidik jari terhadap pelaku kriminal (tersangka) dan sidik jari *non* kriminal (SKCK) dengan pemanfaatan sistem komputerisasi secara nasional dan terpusat secara nasional. Perkembangan metode pengambilan sidik jari di Pusinafis mengalami perubahan, tahun 2016 mengimplementasikan peralatan pengambilan sidik jari secara elektronik yaitu Digitalisasi AK23 adalah alat untuk *input* data sidik jari baik secara live scanner maupun secara scan Kartu AK23 yaitu mendigitalisasikan kartu AK 23 (bentuk fisik) menjadi data AK 23 dalam bentuk data digital. Sehingga proses sinkronisasi antar wilayah atau daerah dapat terwujud. Hal ini dapat membantu keakuratan data dalam menerbitkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) karena seluruh data AK23 dalam bentuk digital telah online dan sudah tersinkronisasi antar pusat dan wilayah (Pusinafis, Polda, dan Polres).

Gambar 1.1 Alat Digitalisasi AK23



Sumber: Data diolah dari Pusinafis Bareskrim Polri (2022)

Alat ini dilengkapi dengan jaringan komunikasi data dan terhubung dengan *database* sidik jari secara terpusat yang ada di *data center* Pusinafis Bareskrim Polri, sehingga pengambilan sidik jari secara otomatis akan tersimpan dalam *database*. Dengan alat tersebut diharapkan Polri mempunyai *database* sidik jari warga negara Indonesia secara nasional dan dapat digunakan dalam mengungkap identitas pelaku tindak pidana atau kegiatan misi kemanusiaan. Alat tersebut terdistribusi di Pusinafis, Polda dan Polres. Manfaat pengambilan secara elektronik dengan Digitalisasi AK23 sebagai berikut:

- a. Data sidik jari dalam bentuk digital menjadi tersinkronisasi dan *Online* seluruh Indonesia;
- b. *Database* sidik jari yang tersimpan akan lebih banyak, karena system terpusat;
- c. Pada saat pengambilan sidik jari, kualitas gambar sidik jari terlihat pada layar monitor, apabila kualitas gambar sidik jari buruk sistem akan menolak sehingga operator harus mengulang kembali sampai dengan kualitas bagus;
- d. Penyimpanan data sidik jari menggunakan *system database* secara terpusat di Pusinafis Bareskrim Polri, apabila data sidik jari tersebut dibutuhkan kembali dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana proses pencarian lebih cepat;
- e. Pengambilan sidik jari yang dilakukan Kewilayahan langsung tersimpan dalam *database* di Pusinafis Bareskrim Polri;
- f. Meminimalisir *human error* saat pengambilan sidik jari, misalnya kesalahan dalam pengambilan posisi sidik jari, karena sistem akan mendeteksi sidik jari yang diambil harus sesuai dengan yang akan diambil (contohnya yang diambil sidik jari jempol kanan, harus sesuai);
- g. Penerbitan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. Karena ketika seseorang yang telah mempunyai catatan kriminal akan membuat SKCK di lain daerah, maka ketika sidik jarinya di ambil dalam kartu AK23 digital akan terdeteksi sehingga muncul catatan kriminalnya;
- h. Dalam mendukung bantuan teknis identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pencarian identitas saksi/korban/pelaku melalui sidik jari menjadi lebih cepat.

Dalam standar kompetensi kerja khusus Pemeriksa Sidik Jari dan Pemeriksa Identifikasi Wajah yang tercantum pada Keputusan Kapusinafis Bareskrim Polri Nomor: Kep/35/XI/2017/Pusinafis tanggal 28 November 2017, tentang standar keahlian yang harus dimiliki oleh anggota identifikasi, terdapat unit kompetensi yang harus dimiliki oleh anggota Identifikasi adalah merekam sidik jari secara elektronik, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengambil sidik jari secara elektronik, berikut ini adalah elemen kompetensi :

- a. Merencanakan pengambilan sidik jari secara elektronik;
- b. Memverifikasi data;
- c. Melaksanakan perekaman sidik jari secara elektronik;
- d. Merekam sidik jari menggunakan Kartu AK23;
- e. Melaporkan hasil pengambilan sidik jari secara elektronik.

Dibeberapa negara pemanfaatan sistem komputerisasi dalam proses input data sidik jari sudah diimplementasikan, salah satunya sebagai contoh di Jepang. Kepolisian Jepang (JICA) kerjasama dengan Polri sesuai dengan kesepakatan antara Polri dan JICA tentang proyek pengembangan kapasitas anggota Kepolisian secara Nasional untuk Polmas-Giat Polisi Sipil Indonesia. Berikut ini adalah perbandingan kegiatan terkait dengan sidik jari di Indonesia dengan Jepang:

Tabel 1.1 Perbandingan Kegiatan Terkait Sidik Jari Antara Indonesia dan Jepang

No	Indonesia	Jepang
1	Pengambilan dan Perekaman sudah menggunakan alat Digital, dengan sistem <i>database</i> terpusat	Pengambilan dan Perekaman sudah menggunakan alat Digital, dengan sistem <i>database</i> terpusat
2	Pengambilan sidik jari dilakukan sampai dengan tingkat Polres	Pengambilan sidik jari dilakukan sampai dengan tingkat Polres
3	Pengambilan sidik jari berlaku untuk masyarakat umum dan pelaku kriminal	Pengambilan sidik jari berlaku untuk pelaku kriminal, bagi masyarakat umum merupakan pelanggaran hak asasi manusia

4	<i>Database</i> sidik jari sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus dan pengungkapan identitas dalam misi kemanusiaan	<i>Database</i> sidik jari sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus
5	Pemeriksaan sidik jari dapat dilakukan sampai dengan tingkat Polres	Pemeriksaan sidik jari hanya dilakukan pada tingkat Polda.
6	Pemeriksa sidik jari harus mempunyai dokumen legalitas	Pemeriksa sidik jari harus mempunyai dokumen legalitas.
7	Pemeriksaan dan Perbandingan sidik jari cukup dilakukan oleh 1 orang <i>expert</i>	Pemeriksaan dan Perbandingan sidik jari harus dilakukan oleh 3 orang <i>expert</i>
8	Anggota identifikasi harus mempunyai kompetensi terkait dengan sidik jari yaitu keterampilan pengambilan/ perekaman dan perumusan sidik jari kriminal dan non kriminal, pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten	Anggota identifikasi harus mempunyai kompetensi terkait dengan sidik jari yaitu keterampilan pengambilan/ perekaman sidik jari kriminal dan pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten
9	Hanya anggota identifikasi yang memiliki kewenangan untuk mengambil sidik jari	Anggota kepolisian dari awal bergabung dengan instansi Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil sidik jari

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

Pada tabel diatas, Jepang dan Indonesia sama-sama sudah mengimplementasikan pengelolaan data sidik jari dengan memanfaatkan sistem komputerisasi dengan database terpusat, terdapat perbedaan yaitu lokasi proses pengambilan sidik jari dan pemeriksaan/ perbandingan sidik jari. Kepolisian Jepang menganggap bahwa sidik jari ini paling utama dan tidak akan terbantahkan sebagai alat bukti dalam tugas Kepolisian. Dikarenakan di negara Jepang tidak ada undang-undang terkait kewenangan pengambilan sidik jari

masyarakat sipil, sehingga data sidik jari kriminal yang menjadi *database* andalan mereka.

Sebagaimana saat ini diketahui sudah memasuki periode revolusi industri 4.0, teknologi hadir sangat cepat dan mengancam keberadaan organisasi dituntut untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Pusinafis sampai saat ini terus mengikuti perkembangan teknologi informasi khususnya untuk perkembangan alat Digitalisasi AK23, tetapi alat yang sudah semakin canggih dengan teknologi tinggi apabila tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak ada artinya, karena SDM merupakan salah satu faktor yang menjadi sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dalam sebuah organisasi adalah SDM baik perusahaan maupun institusi. Selain itu yang menentukan perkembangan suatu perusahaan kuncinya yaitu ada pada SDM. Pada hakikatnya, SDM dalam sebuah organisasi merupakan manusia yang dipekerjakan sebagai pemikir, penggerak dan perencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Saat ini dalam perkembangannya SDM atau karyawan tidak hanya lagi sebagai sumber daya saja, merupakan sebagai asset yang sangat berharga untuk sebuah organisasi. Dalam hal ini SDM bukan hanya dipandang aset utama, melainkan sebagai aset yang sangat tinggi nilainya dan bahkan dapat dilipatgandakan dan dikembangkan, sehingga SDM merupakan modal investasi yang sangat berharga dan lebih mengemuka bagi institusi atau organisasi.

Menurut Muhammad Yusuf (2016) Pengertian SDM dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara mikro dan makro. SDM secara mikro adalah disebut sebagai karyawan, buruh, pegawai, tenaga kerja, pekerja, dan lain sebagainya dimana individu tersebut menjadi anggota yang bekerja dalam suatu perusahaan atau institusi. Sedangkan SDM secara makro adalah penduduk suatu negara baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja dan sudah memasuki usia angkatan kerja,

Dalam sebuah organisasi, demi menunjang kemajuan perusahaan keberadaan SDM yang berkompeten menjadi hal yang sangat penting, dengan terpenuhinya SDM dimaksud maka sebuah perusahaan memiliki potensi lebih untuk berkembang. Oleh karena itu SDM berkualitas pada jaman sekarang

sangat diperlukan untuk dapat menciptakan bangsa Indonesia yang cerdas, mandiri dan sejahtera.

Perkembangan era revolusi industri 4.0, di negara berkembang seperti Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi informasi dengan cepat, dimana latar belakang teknologi yang dimiliki sangat kompleks. Peran teknologi menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan saat ini dapat merubah gaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sangat pesat dan sangat signifikan memberikan kontribusi. Pemberdayaan relasional modal intelektual dan modal sosial merupakan salah satu faktor keberhasilan peningkatan kinerja SDM dan juga harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses kegiatan organisasi dalam rangka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat dan pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.

Mengacu kepada program prioritas Kapolri dibawah pimpinan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si program Polri Presisi, diantaranya adalah menjadikan Polri yang mempunyai SDM unggul di Era *Police* 4.0 dan Perkembangan Teknologi Kepolisian Modern di Era *Police* 4.0. Di tengah era revolusi 4.0, maka sudah seharusnya kompetensi SDM tersebut juga menyertakan adanya pemanfaatan terhadap teknologi kepolisian modern untuk setiap pelaksanaan tugas instansi kepolisian yaitu salah satunya penggunaan alat Digitalisasi AK23.

Berdasarkan Keputusan Kapusinafis Bareskrim Polri Nomor Kep/7/III/2022/Pusinafis tanggal 7 Maret 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Pusinafis Bareskrim Polri Tahun 2020-2024. Dalam Keputusan tersebut Pusinafis menetapkan target kinerja Pusinafis Bareskrim Polri Tahun 2020 s.d. 2024, yaitu salah satunya jumlah data sidik jari yang *ter-input* ke dalam *database*. Berikut ini adalah perkembangan target *input* data sidik jari selama tahun 2020 s.d. 2022:

Tabel 1.2 Target Kinerja Pusinafis Bareskrim Polri 2020 s.d. 2022

No	Tahun	Target	Realisasi	
			Data	%
1	2020	600.000	248.650	41,44
2	2021	700.000	322.939	46,13
3	2022	800.000	497.893	62.23

Sumber: Data diolah dari Pusinafis Bareskrim Polri (2023)

Berdasarkan kepada manfaat penggunaan Digitalisasi AK23 yang telah dijelaskan sebelumnya, *input* data sidik jari menggunakan alat Digitalisasi AK23 menjadi sarana mencapai target Pusinafis Bareskrim Polri, data sidik jari ini bersumber dari pemohon SKCK dan pelaku kriminal. Dari tabel tersebut terlihat selama 3 tahun tidak tercapai *input* data sidik jari melalui alat Digitalisasi AK23, tahun 2020 target sebanyak 600.000 orang realisasi **248.650 (41,44%)**, tahun 2021 target sebanyak 700.000 orang realisasi **322.939 (46,13%)** dan tahun 2022 target sebanyak **800.000 orang**, tetapi target capaian *input* sidik jari selama tahun 2022 hanya sebesar **497.893 orang** atau sebesar **62,23 %** dari target yang sudah ditetapkan. Terlihat kekurangan sebesar **37,77 %** atau **302.107** orang.

Mengacu kepada tabel 1.1. diatas dapat disimpulkan masih terdapat Identifikasi Kewilayahan yang minim dan bahkan tidak sama sekali melakukan proses *input* data sidik jari dengan alsus Digitalisasi AK23 pada tahun 2022. Hal tersebut berdampak kepada sasaran strategis organisasi, yaitu target *input* data sidik jari yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Sebagaimana diketahui sebelum peralatan Digitalisasi AK23 didistribusikan, anggota identifikasi diberikan pelatihan pengoperasian alat tersebut hanya 1 kali oleh Pusinafis Barekrim Polri.

Hasil pengamatan awal peneliti, tidak tercapainya target tersebut yaitu terdapat kerusakan alat Digitalisasi AK23 di Kewilayahan dan SDM yang sudah mendapat pelatihan dipindahkan tanpa ada *transfer knowledge* terlebih dahulu kepada SDM yang baru/masih ada sehingga pemahaman anggota tentang penggunaan alat Digitalisasi AK23 kurang, sehingga mengakibatkan alat Digitalisasi AK23 tidak digunakan sama sekali, dan pada akhirnya capaian input data sidik jari Kewilayahan minim/ tidak mencapai target sesuai dengan yang

telah ditetapkan, (penentuan target per wilayah dalam perhitungannya dengan menggunakan data sensus penduduk tahun 2020), berikut ini data target dan realisasi data input sidik jari Kewilayahan:

Tabel 1.3 Data Pengambilan Sidik Jari Kewilayahan Tahun 2022

No	Polda	Target Input Sidik Jari 2022	Capaian Input Data Sidik Jari 2022	Keterangan
1	D.I. Yogyakarta	10.880	30.138	Tercapai
2	Sulawesi Selatan	26.880	27.016	Tercapai
3	Sulawesi Tengah	8.800	19.336	Tercapai
4	Bali	12.800	19.238	Tercapai
5	Kalimantan Tengah	7.920	19.040	Tercapai
6	Kalimantan Selatan	12.080	16.622	Tercapai
7	Sulawesi Tenggara	7.760	15.894	Tercapai
8	Jambi	10.480	15.216	Tercapai
9	Sulawesi Utara	7.760	14.287	Tercapai
10	Papua	12.720	13.038	Tercapai
11	Bengkulu	5.920	7.495	Tercapai
12	Maluku Utara	3.760	6.091	Tercapai
13	Sulawesi Barat	4.160	5.179	Tercapai
14	Jawa Tengah	108.080	44.776	Tidak tercapai
15	Jawa Barat	142.960	33.992	Tidak tercapai
16	Jawa Timur	120.400	28.458	Tidak tercapai
17	Sumatera Utara	43.840	28.212	Tidak tercapai
18	Lampung	26.640	21.673	Tidak tercapai
19	Riau	18.960	17.730	Tidak tercapai
20	Sumatera Selatan	25.040	16.268	Tidak tercapai
21	Nusa Tenggara Barat	15.680	15.510	Tidak tercapai
22	Nusa Tenggara Timur	15.760	13.975	Tidak tercapai
23	Aceh	15.600	13.419	Tidak tercapai
24	Sumatera Barat	16.400	9.284	Tidak tercapai

25	Kalimantan Timur	11.120	8.950	Tidak tercapai
26	Banten	35.280	7.264	Tidak tercapai
27	Kep. Bangka Belitung	4.320	4.186	Tidak tercapai
28	Kalimantan Barat	16.000	3.769	Tidak tercapai
29	Gorontalo	3.440	2.647	Tidak tercapai
30	Metro Jaya	31.280	2.416	Tidak tercapai
31	Maluku	5.440	2.348	Tidak tercapai
32	Kepulauan Riau	6.080	1.692	Tidak tercapai
33	Kalimantan Utara	2.080	1.129	Tidak tercapai
34	Papua Barat	12.720	496	Tidak tercapai

Sumber: Data diolah dari Pusinafis Bareskrim Polri (2022)

Pada data tabel 1.2, merupakan gambaran *input* data sidik jari yang dilakukan selama tahun 2022, input data sidik jari ini adalah cerminan penggunaan alat Digitalisasi AK23, dari tabel tersebut yang mencapai target input data sidik jari sebanyak 13 Polda sedangkan sisanya tidak tercapai sebanyak 21 Polda, sebagai contoh yang tidak tercapai peringkat 5 terbawah Polda Metro Jaya dengan capaian 2416 data, Polda Maluku 2348 data, Kepulauan Riau 1692 data, Kalimantan Utara 1129 data dan Polda Papua Barat 496 data.

Pada tahun 2023, Pusinafis melakukan terobosan yaitu melakukan kerja sama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya untuk siswa kelas 3. Kerja sama yang dilakukan yaitu pengambilan sidik jari, diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan lebih meningkatkan target *input* sidik jari. Kegiatan ini belum dilakukan secara nasional, tetapi beberapa wilayah sudah melaksanakan kegiatan ini. Terkait dengan tidak tercapainya capaian input data sidik jari di Kewilayahan, hasil pengamatan awal berikutnya adalah dari sisi kuantitas terdapat kekurangan anggota Identifikasi Kewilayahan, tugas pokok dalam kegiatan sehari-harinya tidak hanya melakukan input data sidik jari, tetapi melaksanakan tugas pokok yang lainnya yaitu:

1. Pemeriksaan teknis TKP (olah TKP);
2. Pemeriksaan terhadap barang bukti;

3. Menyelenggarakan teknis kegiatan pemotretan dan rekonstruksi TKP maupun tersangka guna mendapatkan material dalam rangka mendukung penyidikan yang kebenaran dapat dipertanggungjawabkan, penuntutan dan peradilan berikut memberikan kegiatan pelayanan umum menyesuaikan dengan lingkup kewenangan;
4. Menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara pidana yang melibatkan peran bantuan teknis pada fungsi identifikasi.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana atau almatsus berupa peralatan digital (AK23 Digital, IPS, Mambis, MMS) dan aplikasi (OS Inafis dan ECMS) serta konektifitas jaringan berikut troubleshooting.

Tabel berikut adalah gambaran kuantitas anggota Pusinafis dan Kewilayahan saat ini, dalam tabel tersebut terlihat masih terlihat terdapat kekurangan jumlah anggota / tidak sesuai, sesuai DSPP jumlah anggota secara keseluruhan **5152** orang, sedangkan DSPP rill sebanyak **1809** orang.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Tabel 1.4 Daftar Anggota Pusinafis dan Identifikasi Kewilayahan

NO	POLDA	TIPE	KUANTITAS (DSPP)						KUANTITAS RIIL					
			DSPP POLDA	DSPP RES METRO	DSPP REST ABES	DSPP RESTA	DSPP RES	TOT DSPP	RILL POLDA	RILL RES METRO	RILL RESTA BES	RILL RESTA	RILL RES	TOT RIIL
	PUSINAFIS		81					81						65
1	ACEH	A	22			9	180	211	6			2	36	44
2	SUMSEL	A	22			15	144	181	10			8	33	51
3	SULSEL	A	22		15		216	253	12		11		55	78
4	KALTIM	A	22			9	72	103	4			5	20	29
5	KEPRI	A	22			9	54	85	3			5	13	21
6	DIY	A	22			9	36	67	10			9	35	54
7	BALI	A	22			9	72	103	11			8	38	57
8	SUMUT	A	22		15	9	234	280	8		11	4	59	82
9	SULTENG	B	22				99	121	9				36	45
10	BENGGULU	B	22				81	103	4				19	23
11	NTT	A	22				144	166	6				44	50
12	LAMPUNG	A	22			9	117	148	8			2	29	39
13	SUMBAR	A	22			9	162	193	5			7	39	51
14	JAMBI	A	22			9	63	94	8			1	11	20
15	RIAU	A	22			9	99	130	8			9	26	43
16	BABEL	B	19				63	82	6				18	24
17	METRO JAYA	A+	22	183				205	17	85				102
18	JABAR	A	22		15		189	226	14		15		105	134
19	BANTEN	A	22				54	76	7				20	27
20	JATENG	A	22		15	18	288	343	12		15	15	140	182
21	JATIM	A	22		15		342	379	12		12		161	185
22	NTB	A	22				90	112	6			4	31	41
23	KALBAR	A	22			9	108	139	7			11	32	50
24	KALTENG	A	22			9	117	148	9			3	28	40
25	KALSEL	A	22			9	108	139	7			5	28	40
26	SULUT	A	22			9	72	103	8			7	21	36
27	KALTARA	B	19				36	55	2				10	12
28	GORONTALO	B	19				45	64	2				7	9
29	SULTRA	B	22				108	130	7				23	30
30	SULBAR	B	19			9	45	73	3			3	11	17
31	PAPUA	A	22				261	283	6				58	64
32	PAPUA BARAT	B	19				72	91	5				21	26
33	MALUKU	A	22				72	94	5				16	21
34	MALUT	B	19				72	91	2				15	17
TOTAL			811	183	75	168	3915	5152	249	85	64	108	1238	1809

Sumber: Data diolah Pusinafis Bareskrim Polri (2022)

Dalam tabel berikut merupakan gambaran kondisi anggota identifikasi di Pusinafis Bareskrim dan Identifikasi Kewilayahan, dalam hal peningkatan kemampuan dalam bidang identifikasi, kegiatan pembinaan fungsi identifikasi yang sudah dilaksanakan yaitu Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Identifikasi, Uji Kompetensi Kerjasama dengan JICA (Kepolisian Jepang), seperti terlihat pada tabel berikut ini adalah kondisi anggota identifikasi terkini:

Tabel 1.5 Kondisi Anggota Pusinafis dan Identifikasi Kewilayahan

NO	POLDA	KUANTITAS		KUALITAS												JUMLAH	KUALITAS		
		DSPP	RIIL	SERTIFIKASI SIDIK JARI						JUMLAH	SERTIFIKASI IDENT WAJAH						DIKBANG SPES	UJI KOMPETENSI JICA	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		2018	2019	2020	2021	2022				2023
	PUSINAFIS	81	65	10		4			14	5		2			7	7	13	41	
1	ACEH	211	44		1			22	23					7	7	8	32		
2	SUMSEL	181	51		3	1		1	5		2				2	5	21		
3	SULSEL	253	78	1	1	18			20		2	4			6	10	37		
4	KALTIM	103	29		3				3						0	8	33		
5	KEPRI	85	21		3				3						0	6	15		
6	DIY	67	54	2	2	2	3	1	10				2		2	18	24		
7	BALI	103	57	1	5	1		17	24		1			6	7	23	12		
8	SUMUT	280	82		4				4		2				2	14	45		
9	SULTENG	121	45			3			3						0	8	22		
10	BENGKULU	103	23			1			1						0	6	22		
11	NTT	166	50	1	2	2		11	16						0	9	28		
12	LAMPUNG	148	39		6	5		1	12						0	12	24		
13	SUMBAR	193	51		3			24	27					6	6	13	6		
14	JAMBI	94	20		3				3		1				1	8	16		
15	RIAU	130	43		2	1		1	4						0	9	11		
16	BABEL	82	24		3	3			6			1			1	8	15		
17	METRO JAYA	205	102	11		1		10	22	2		1		4	7	6	21		
18	JABAR	226	134		3	2	21		26				2		2	23	26		
19	BANTEN	76	27		2	1		5	8						0	8	18		
20	JATENG	343	182		5	2	17		24		6		8		14	36	8		
21	JATIM	379	185		5	1		25	31		1	1		7	9	18	13		
22	NTB	112	41		1			1	13	15					7	7	10		
23	KALBAR	139	50		7				7			1			1	13	29		
24	KALTENG	148	40		2				2						0	8	37		
25	KALSEL	139	40	1	3				4						0	9	35		
26	SULUT	103	36					1	1						0	10	36		
27	KALTARA	55	12						0						0	1	8		
28	GORONTALO	64	9		2				2						0	3	9		
29	SULTRA	130	30		1	4			5						0	11	19		
30	SULBAR	73	17			2			2						0	2	14		
31	PAPUA	283	64		3				3						0	7	20		
32	PAPUA BARAT	91	26						0						0	5	10		
33	MALUKU	94	21		1				1						0	6	18		
34	MALUT	91	17						0						0	2	12		
	TOTAL	5152	1809	27	76	50	45	109	24	331	7	15	8	14	30	7	81	356	778

Sumber: Data diolah Pusinafis Bareskrim Polri (2023)

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi anggota Pusinafis dan Identifikasi Kewilayahan, mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan meliputi:

1. Uji Kompetensi JICA, yaitu kegiatan peningkatan kemampuan terkait dengan pengambilan sidik jari secara manual, pencarian dan pengembangan sidik jari laten, pemeriksaan sidik jari dan pemotretan sidik jari laten, kegiatan ini adalah kerjasama dengan Kepolisian Jepang (JICA), dalam kegiatan ini tidak diberikan pengetahuan peralatan Digitalisasi AK23;
2. Dikbangspes, yaitu kegiatan pendidikan dan pengembangan spesialisasi khususnya dalam bidang Identifikasi. Kegiatan ini meliputi pengetahuan Daktiloskopi Kriminal, Daktiloskopi Umum, Fotografi Kepolisian dan

Pengenalan Sistem Informasi (Sisinfo). Dalam kegiatan ini anggota diberikan pengetahuan tentang pengoperasian alat Digitalisasi AK23.

3. Sertifikasi Wajah, yaitu kegiatan terkait dengan pengujian pengetahuan anggota identifikasi khususnya mengenai pemeriksaan wajah.
4. Sertifikasi Sidik Jari, yaitu kegiatan terkait dengan pengujian pengetahuan anggota identifikasi khususnya mengenai pemeriksaan dan perbandingan sidik jari. Didalamnya terdapat pengujian peralatan, yaitu pengoperasian alat Digitalisasi AK23.

Pada tabel 1.5 merupakan gambaran kegiatan peningkatan kemampuan yang diikuti oleh anggota identifikasi, terlihat 331 orang sudah mengikuti sertifikasi sidik jari, 81 orang sudah mengikuti sertifikasi wajah, 356 orang sudah mengikuti Dikbangspes dan 778 orang mengikuti uji kompetensi JICA, jumlah tersebut mencerminkan anggota yang sudah mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan/ kompetensi masih rendah dari total DSP rill. Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi dinamika anggota Identifikasi di Kewilayahan terjadi mutasi/perpindahan, tanpa didahului dengan adanya proses regenerasi atau *transfer knowledge*, sehingga pengetahuan anggota yang ditinggalkan terhadap peralatan yang ada di Identifikasi Kewilayahan sangat minim. Selain permasalahan kuantitas anggota, yang dirasa kurang dari sisi capaian input data sidik jari yang belum tercapai dan hal ini berkaitan dengan kompetensi anggota (Rande (2016:101-109), Marlina (2011) dan Pramularso (2018)) penulis bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kompetensi SDM Dalam Penggunaan Alat Digitalisasi Administrasi Kepolisian (AK) 23 di Kepolisian Negara Republik Indonesia**”.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena input data sidik jari menggunakan Digitalisasi AK23 merupakan sarana dalam rangka menambah *database* sidik jari di Polri, sidik jari manusia itu unik dan setiap orang berbeda, walaupun kembar sekalipun, sehingga menjadi komponen yang sangat penting dalam mengungkapkan kasus di Kepolisian. Selain itu sidik jari bisa menjadi pembuktian bila ada kasus pemalsuan sidik jari surat atau dokumen penting lainnya, dan yang terakhir bisa digunakan untuk mengidentifikasi identitas korban dalam sebuah tragedi hingga bencana alam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut diatas peneliti mengidentifikasi masalah yaitu

1. Tidak tercapainya target *input* data sidik jari ke dalam *database* tahun 2022.
2. Terdapat permasalahan kompetensi SDM dalam menggunakan alat Digitalisasi AK23, yang berdampak pada belum tercapainya target *input* sidik jari.

C. Rumusan Permasalahan

Dari hasil identifikasi masalah, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kompetensi SDM dalam menggunakan alat Digitalisasi AK23?
2. Bagaimana strategi peningkatan kompetensi SDM dalam menggunakan alat Digitalisasi AK23?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi SDM dalam menggunakan alat Digitalisasi AK23.
2. Menganalisis strategi peningkatan kompetensi SDM dalam menggunakan alat Digitalisasi AK23.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan dimaksud, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Aspek Akademik, hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan dokumen perguruan tinggi yang berguna untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan sekaligus dapat menjadi acuan, referensi maupun bahan rujukan ilmiah hal analisis kinerja bagi praktisi pendidikan maupun peneliti.
2. Aspek praktis, hasil penelitian tersebut dapat dijadikan informasi sebagai masukan dan pembelajaran yang berguna serta dapat diterapkan dalam

rangka meningkatkan target pengambilan sidik jari yang dilaksanakan
Pusinafis Bareskrim Polri dan Identifikasi Kewilayahan



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**